



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**

**DENGAN**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**

**NOMOR: W.5-4.HH.04.02 Tahun 2023**

**NOMOR: PKS/46/VI/KA/RH.00.00/2023/BNNP**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA SERTA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ERWAN PRASETYO, A.Md.I.P., S.H., M.Si** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**, atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Bangko, Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN. POL. WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**, atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jl. H. Zainir Haviz No. 01, Kecamatan Kota Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Dengan memperhatikan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: **M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018**.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama

Pihak I	Pihak II

dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi; dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO;
- b. Sosialisasi program pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Kerja sama pengungkapan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO;
- d. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO;
- e. Rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi warga binaan dan petugas pemasyarakatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO;
- f. Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan dan petugas

Pihak I	Pihak II
	

- pemasyarakatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO; dan
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi warga binaan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO.

Yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **BAB III**

#### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut:

(1) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Pertukaran informasi mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan yang terindikasi melakukan peredaran narkoba dan penyalahguna narkoba di dalam lapas.
2. Pembinaan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bangko terkait Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba.

(2) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
2. Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi; dan
3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

1. Menyiapkan narasumber; dan
2. Menyiapkan materi dan alat peraga.

(3) Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pihak I	Pihak II
	<i>h</i>

## BAB IV

### Pasal 4

#### PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bangko

b. **PIHAK KEDUA:**

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

## BAB V

### Pasal 5

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## BAB VI

### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

## BAB VII

#### KETENTUAN LAIN

### Pasal 7

#### Bagian Kesatu

##### Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu

Pihak I	Pihak II
	

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 9**  
**Bagian Ketiga**  
**Perubahan**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
  - c. Tindakan atau derelugasi pemerintah dibidang Hukum dan Pemasarakatan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

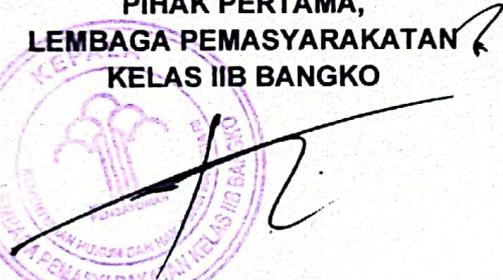
**BAB VIII**

**Pasal 10**

**PENUTUP**

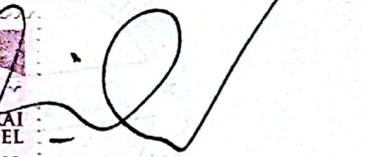
Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai Rp10.000, - masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

**PIHAK PERTAMA,  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB BANGKO**



**ERWAN PRASETYO, A.Md.I.P., S.H., M.Si.**  
NIP. 19750215 199803 1 001

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI JAMBI**



**WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.**  
NRP. 67040405